



*LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA & PERSANDIAN*

TAHUN 2022



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Telp./Fax. (0266) 320255
Cikembang - Sukabumi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia-Nya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dapat menyelesaikan semua program dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022. Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan gambaran mengenai program kegiatan dan kinerja pada setiap Tahun Anggaran berjalan, maka kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan sistematisa sebagaimana yang telah diilustrasikan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini akan dijadikan bahan koreksi kami lebih lanjut di masa - masa yang akan datang.

Demikian untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Sukabumi, 06 Februari 2022

KEPALA DINAS,


EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP.19670903 199601 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Tahun 2022			Capaian s.d. Akhir Periode RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN								
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.								
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur		Poin	3.00	2.60			
	SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	100.00	76.17	76.17	100	

Indikator kinerja cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah diukur dengan jumlah wilayah blankspot internet (*Zero Blankspot*) sebanyak 92 titik/desa dengan capaian realisasi yang telah tertangani sebanyak 294 titik/desa.

B. Capaian Kinerja Berdasarkan Proyek Prioritas Pembangunan Tahun 2022

PROYEK PRIORITAS TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI							
PROYEK PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN 2022 (%)	
						K	Rp.
Zero Blank Spot Internet Area	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bandwich Jaringan	Titik (Desa)	100.00	99.86
Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan masyarakat dalam bentuk android melalui aplikasi DESA KaMi.	Aplikasi	100.00	99.75
Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan dengan nama layanan kami ada	Aplikasi	100.00	99.85

Indikator kinerja proyek prioritas Tahun Anggaran 2022 diukur dengan tiga indikator sebagai berikut :

1. Penanganan Zero Blankspot dengan target 23 titik/desa, realisasi 23 titik/desa.
2. Digitalisasi Pelayanan Publik (Desa dan Kabupaten) dengan target 1 aplikasi Desa Kami, realisasi 1 Aplikasi Desa Kami.
3. Integrasi Sistem Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digital dengan target 1 Aplikasi Kami Ada, realisasi 1 Aplikasi Kami Ada.

C. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021 – 2026

Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon II)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	%	40	49	122
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	%	46	64	138
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	%	32	32	100

D. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon III)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022 (%)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	RP	Kinerja	Rp
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	20	4,340,716,300	39	4,282,805,878	193%	98.67
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	31	4.435.208.240	43	4,394,127,279	139%	99.07
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	32	253,642,800	32	252,227,800	100%	99.44
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	31	299,332,000	50.73	288,032,000	164%	96.22
X	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	22,774,700	100	22,072,700	100	97
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	5,620,672,053	100	5,619,218,47	100	100
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	755,546,000	100	701,675,360	100	93
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	833,716,374	100	823,165,506	100	99
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	2,770,491,100	100	2,756,239,934	100	99
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	0	0	0	0	0
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	15,463,975	100	15,463,600	100	100
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	12,462,000	100	12,434,500	100	99.78

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Cascading Kinerja DKIP	3
1.5 Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	5
1.6 Isu Strategis	6
1.7 Rekomendasi CHE SAKIP Tahun 2021	8
1.8 Landasan Hukum	10
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Dinas	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	19
2.4 Perjanjian Kinerja	27
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	28
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2022	29
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan Kinerja	31
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	33
3.5 Inovasi	34
3.6 Kinerja Lintas Sektor	37
BAB. IV PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Rekomendasi	36
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

BAB I berisi :

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Cascading Kinerja
5. Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
6. Isu-Isu Strategis
7. Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021
8. Landasan Hukum

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* tersebut dengan baik mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR

Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 serta . Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dituntut juga untuk menyampaikan akuntabilitas kinerjanya melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sehingga sasaran, program, indikator dan target kinerja Dinas pada Laporan Kinerja Tahun 2022 ini mengacu kepada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-Tahun 2026.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika ini adalah sebagai bahan pelaporan tahunan dari kinerja Dinas tersebut dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian, dengan tujuan memberi informasi tentang hasil Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, maka DiskominfoSan menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

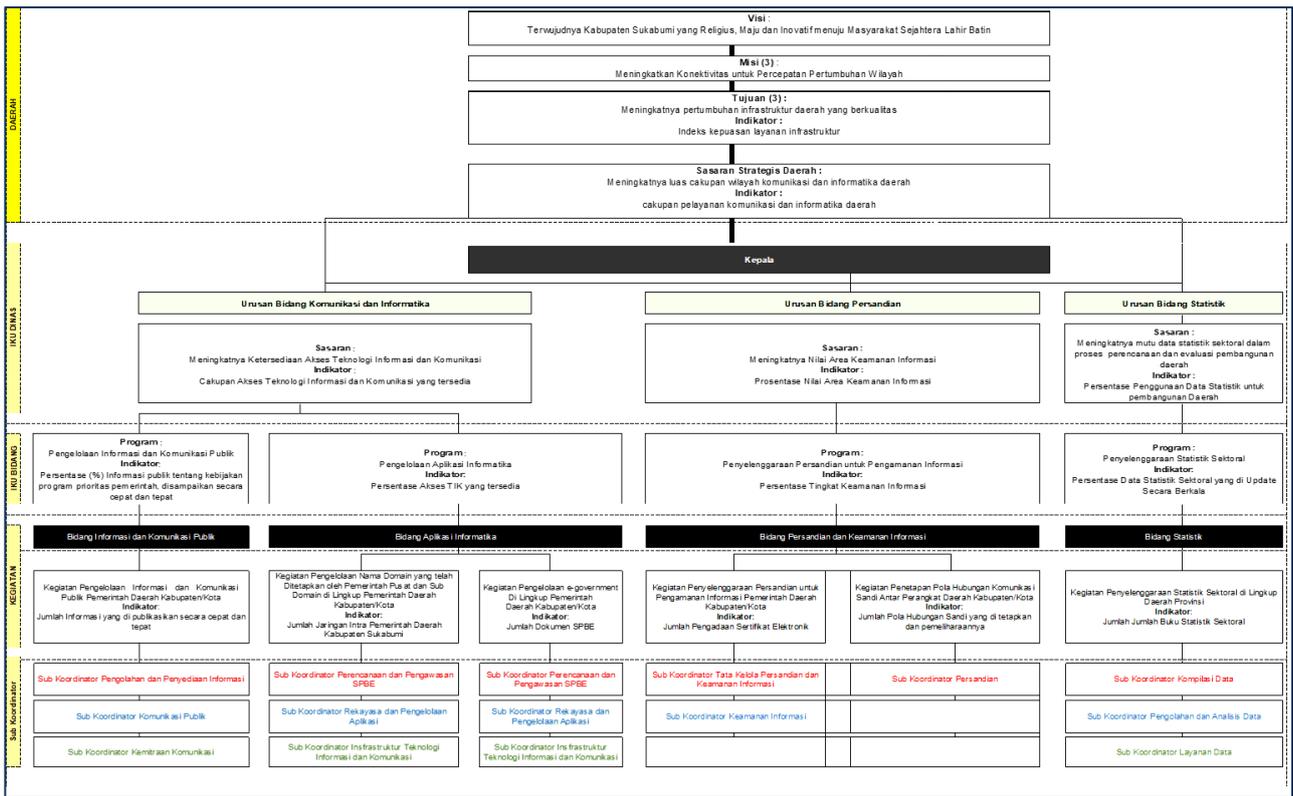
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik;
- c. Pemantauan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; Bidang Aplikasi Informatika; Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

- Bidang Statistik; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dinas;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - f. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan nama domain dan subdomain daerah kabupaten sukabumi;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik) daerah kabupaten;
 - i. Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat;
 - j. Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik daerah kabupaten;
 - k. Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi daerah kabupaten;
 - l. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah kabupaten;
 - m. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
 - n. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - o. Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugas;
 - q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.4. CASCADING KINERJA DKIP

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang ditetapkan Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



1.5. PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara peta proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tersaji dalam gambar berikut :

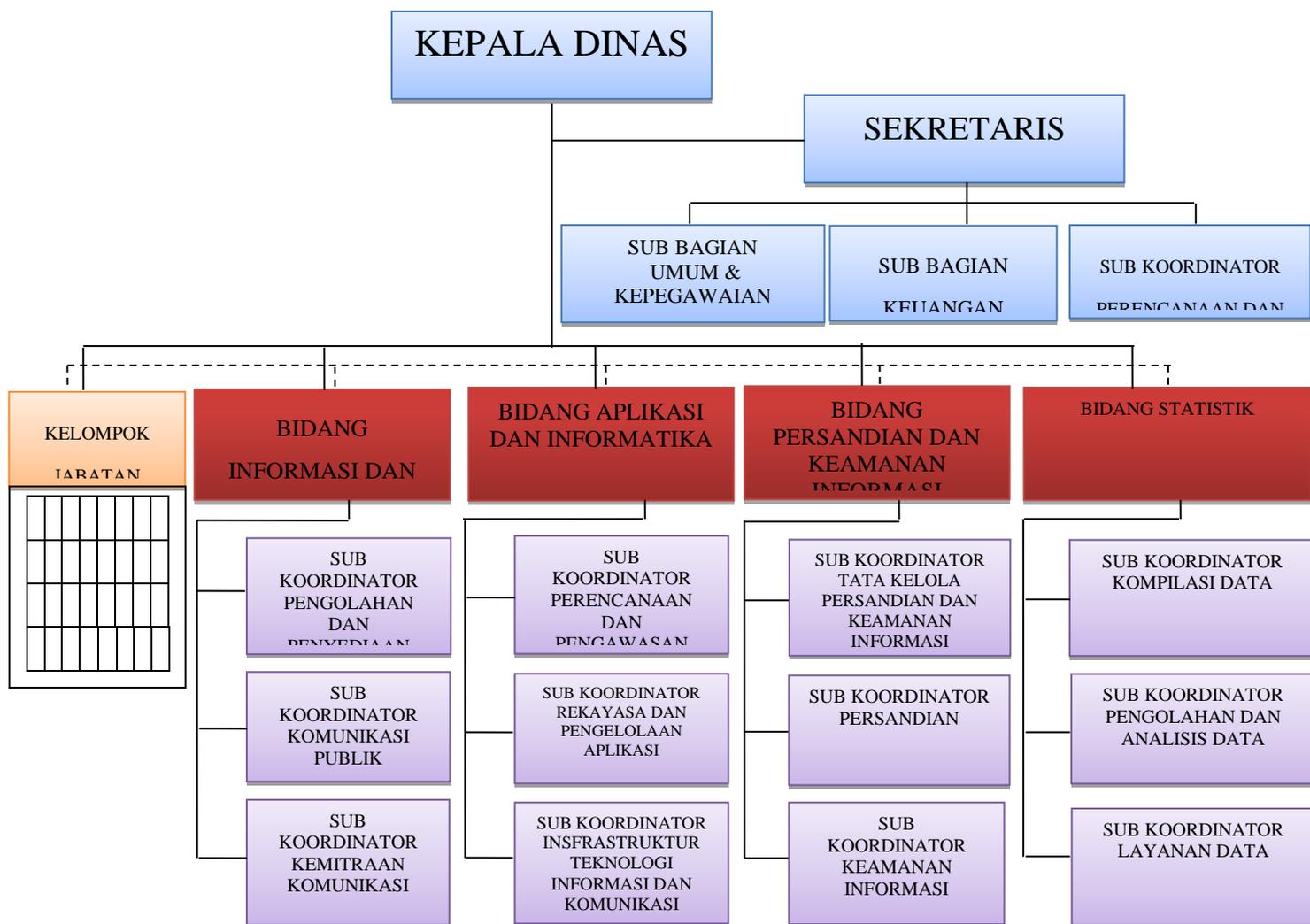


Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, maka struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
 2. Sub Koordinator Komunikasi Publik; dan
 3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi.
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan SPBE;
 2. Sub Koordinator Rekayasa dan Pengelolaan Aplikasi; dan
 3. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
 2. Sub Koordinator Persandian; dan
 3. Sub Koordinator Keamanan Informasi;
- f. Bidang Statistik, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Kompilasi Data;
 2. Sub Koordinator pengolahan dan Analisis Data; dan
 3. Sub Koordinator Layanan Data.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi



BUPATI SUKABUMI

TTD

MARWAN HAMAMI

———— GARIS KOMANDO
 - - - - - GARIS KOORDINASI

1.6. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Dinas dengan mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan, antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan

- daya saing ekonomi daerah.
2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*e-government*).
 3. Kualitas jaringan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga masih terdapat 115 titik yang berstatus *blank spot area*.
 4. Belum optimalnya keterisian data SIPD, dimana ditargetkan terisi 70 persen tetapi belum terealisasikan
 5. Masih belum meratanya akses TIK yang tersedia sebagai fasilitas penunjang pelayanan publik.
 6. Masih rendahnya kapasitas masyarakat terhadap alat teknologi informasi sebagai faktor pendukung dalam era transformasi digital.
 7. Masih rendahnya tingkat kompetensi dan kualifikasi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
 8. Sarana prasarana fasilitas dilingkungan dinas masih terbatas.
 9. Masih belum meratanya pelayanan informasi ke pada masyarakat.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, berikut adalah faktor pendorong dan penghambat pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, diantaranya yaitu :

- a. Faktor Pendorong :
 - Tersedianya sumber daya manusia yang masih produktif dan berpotensi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - Mulai berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menunjang pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Faktor Penghambat :
 - Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
 - Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topologi perbukitan menjadi permasalahan dalam pemasangan infrastruktur penunjang akses internet;
 - Fasilitasi Penunjang Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.

Dengan melalui telaahan dari Visi dan Misi Program Kepala Daerah dengan pandangan bahwa Pemerintah Kabupaten merumuskan perencanaan Pembangunan dengan merepresentasikan keinginan Kepala Daerah terpilih selama

masa kepemimpinannya bahwa Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang **RELIGIUS,
MAJU, dan **INOVATIF** Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir**”

Hal tersebut pada intinya adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan Pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam pelaksanaan tugas perlu menanamkan kejujuran kedisipinan, keterbukaan, tanggungjawab sehingga dapat memberikan laporan yang akuntabel, dengan Misi Bupati Sukabumi di Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam RPJMD , yaitu Misi ke 3 :

**“MENINGKATKAN KONEKTIFITAS UNTUK PERCEPATAN
PERTUMBUHAN WILAYAH”**

1.7. REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2021

No	Saran Rekomendasi	Tindak Lanjut
a.	Format Kinerja menyajikan: 1. Laporan Kinerja seluruhnya menampilkan data penting indikator kinerja sasaran. 2. Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 3. Laporan kinerja menyajikan upaya perbaikan kedepan.	Format Kinerja : 1. Laporan Kinerja telah disesuaikan dengan menampilkan data penting indikator sasaran 2. Lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan telah disajikan. 3. Laporan Kinerja telah menyajikan upaya perbaikan kedepannya.
b.	Mekanisme Penyusunan menyajikan : 1. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan data yang memadai. 2. Menyajikan SOP mekanisme Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja. 3. Menyajikan IKI 4. Menyajikan laporan Kinerja secara periodik 5. Adanya dokumentasi secara administrasi yang melibatkan pimpinan sebagai pengambilan keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja. 6. Data kinerja telah terintegrasi di SIAK namun pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara	1. Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai. 2. SOP mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah di lampirkan. 3. Iki telah disajikan secara terpisah dari dokumen Laporan Kinerja. 4. Laporan Kinerja periodic telah dilengkapi melalui laporan evaluasi renja triwulanan. 5. Dokumen administrasi yang melibatkan pimpinan sebagai pengampilan keputusan sudah terdokumentasi dengan baik melalui bukti notulen rapat. 6. Data kinerja telah di integrasikan di dalam sistem aplikasi kemenpan RB dan website Kabupaten Sukabumi. 7. Laporan Monitoring dan evaluasi dibagi habis pada eselon III/IV sudah tersedia

	<p>berjenjang tidak terdokumentasikan.</p> <p>7. Menyajikan laporan Monitoring dan Evaluasi yang dibagi habis pada Esselon III/IV.</p> <p>8. Menyajikan Laporan Evaluasi internal unit secara periodic</p> <p>9. Menyajikan Laporan Evaluasi Kinerja Internal secara berjenjang (Seksi/Bidang/PD).</p>	<p>melalui laporan evaluasi renja triwulanan.</p> <p>8. Laporan Evaluasi internal telah tersedia melalui laporan evaluasi renja triwulanan.</p> <p>9. Laporan Evaluasi kinerja internal secara berjenjang telah tersedia namun terpisah dari dokumen laporan kinerja.</p>
c.	<p>Substansi menyajikan :</p> <p>1. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) harus memenuhi kriteria SMART.</p> <p>2. Capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja dapat diandalkan.</p> <p>3. Menyusun cascading kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari level structural dan fungsional sampai dengan individu pegawai untuk mencapai tujuan organisasi (Proses Bisnis).</p> <p>4. Perencanaan Kinerja menyajikan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya dan agar ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi kinerja.</p> <p>5. Aktivitas kinerja telah disajikan dalam Rencana Aksi dan dibagi ke dalam bidang/seksi.</p> <p>6. Capaian Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum optimal.</p>	<p>1. Seluruh Indikator Kinerja sudah memenuhi kriteria SMART</p> <p>2. Capaian kinerja telah lebih baik dari sebelumnya, dibuktikan dengan target kinerja yang meningkat.</p> <p>3. Cascading telah disusun berdasarkan IKU dan Proses Bisnis Dinas.</p> <p>4. Perencanaan Kinerja sudah menyajikan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.</p> <p>5. Aktifitas kinerja telah disajikan dalam rencana aksi.</p> <p>6. Capaian i=kinerja sudah optimal.</p>
d.	<p>Perbaikan Implementasi :</p> <p>1. Mengembangkan sistem perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi secara optimal.</p> <p>2. Mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan berbasis aplikasi teknologi informasi.</p> <p>3. Mempublikasikan Laporan Kinerja (LKj) kepada masyarakat umum dan stakeholder.</p> <p>4. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan reward dan punishment. • Penilaian SKP. • Penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. • Penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional. • Penyesuaian (Refocusing Organisasi). • Perbaikan Perencanaan dan 	<p>1. Sistem Aplikasi SAKIP masih menggunakan Aplikasi dari kemenpan RB</p> <p>2. –</p> <p>3. Laporan kinerja telah dipublikasikan di website Pemerintah Daerah.</p> <p>4. SAKIP telah dijadikan bahan evaluasi di lingkup internal Dinas khususnya DKIP</p> <p>5. Analisis kemajuan capaian kinerja dan hambatannya telah di kemukakan dalam laporan kinerja.</p> <p>6. Hasil evaluasi kinerja internal telah ditindak lanjuti</p> <p>7. Subtansi penyusunan Laporan Kinerja telah disesuaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>

<p>Penganggaran.</p> <p>5. Dokumentasi tindak lanjut atas Langkah Langkah evaluasi internal, diantaranya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program, evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.</p> <p>6. Hasil evaluasi internal ditindaklanjuti, dimanfaatkan dan dijadikan bahan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.</p> <p>7. Penyesuaian substansi penyusunan Laporan Kinerja agar disesuaikan Kembali sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	
---	--

1.8. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 mengacu pada :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
8. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 , tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 110 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PD

BAB II berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan di dasarkan kepada sasaran strategis Dinas Tahun 2021 s/d 2026.

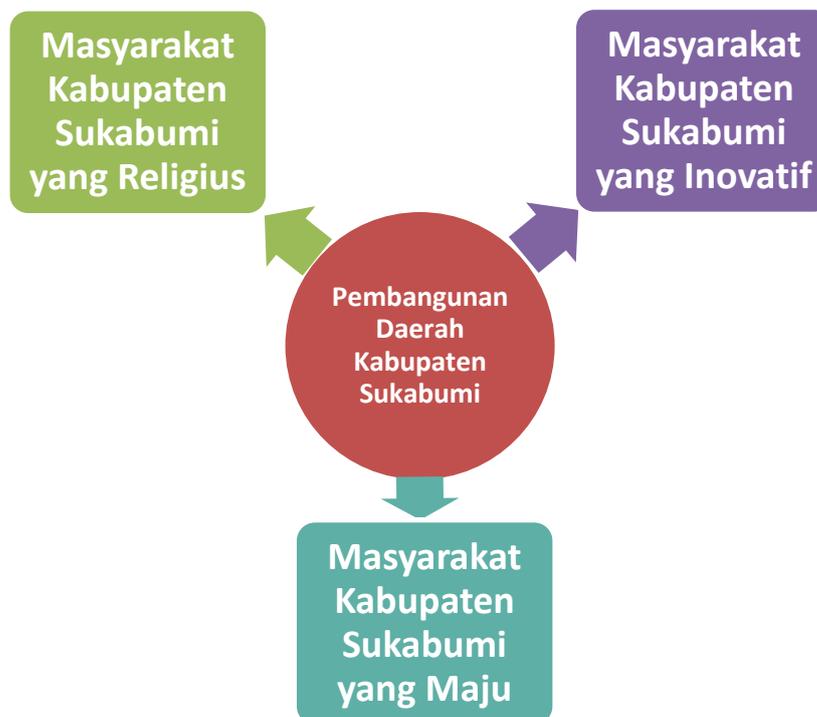
Adapun Sasaran Strategis Dinas Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang ditetapkan dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang RELIGIUS, MAJU, dan INOVATIF Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir

Visi diatas mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2026 yakni **Religius, Maju dan Inovatif**. Dari dua elemen tersebut maka diritelaah bahwa Kepala Daerah ingin membangun masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sejahtera lahir dan batin dengan tetap mempertahankan moral religiusitas, sumber daya manusia yang berdaya saing dengan inovasi – inovasi yang baru. Adapun hubungan antar elemen visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tergambar pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi



Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan Misi Kabupaten Sukabumi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir mengenai maksud realistik yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dicapai. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the Choose Track*) bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *Stakeholder* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (Pemerintah Daerah) harus dijaga oleh segenap *Stakeholders*

Pembangunan. Berdasarkan identifikasi Visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
3. **Meningkatkan Konektifitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah**

Sesuai dengan cascade kinerja, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai visi '**Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin**', misi yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik adalah misi ke-3 yakni '**Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah**' dengan sasaran daerah yaitu '**Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah**'

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Dinas Kominfo
2021 – 2026 (Eselon II)

Tujuan	Sasaran PD	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	1.1. Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	14	40	55	70	85	100

		yang tersedia						
	1.2. Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	32	46	60	73	86	100
	1.3. Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	16	32	49	66	83	100

Tabel 2.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Pelayanan Dinas Kominfo
2021 – 2026 (Eselon III)**

Tujuan	Sasaran PD	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	2.1. Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Akses TIK yang tersedia	14	31	48	65	83	100
		Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	10	20	40	60	80	100

2.2. Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Tingkat Keamanan Informasi	13	31	48	65	82	100
2.3. Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	16	32	49	66	83	100

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategis dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu point penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta peningkatan luas cakupan akses teknologi informasi dan komunikasi sehingga peningkatan percepatan pertumbuhan konektivitas wilayah dalam terwujud

Rumusan Strategi menunjukkan Langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*Value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa Langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah)
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*Key Success Factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, dan;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD

Adapun rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

1. MISI 3

Meningkatkan Konektifitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Tabel 2.3
Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 3
Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Tujuan No :	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
3	Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Luas Cakupan Wilayah Komunikasi dan Informatika	<p>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian</p> <p>Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika</p> <p>Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area</p> <p>Peningkatan Kualitas Informasi Publik</p>

Tujuan No :	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
			Meningkatkan pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sectoral

Sumber : Dokumen RPJMD 2021-2026

Pencapaian sasaran pembangunan dinas yang mengacu kepada RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai Prioritas Pembangunan (*Strategi Focused Organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah di gambarkan diatas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Arah kebijakan merupakan instrument langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD, adapun fokus atau tema pembangunan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi
Tahun 2022 – 2026



Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan pembangunan wilayah untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Adapun hasil dari perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
Misi : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian 2. Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika 3. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung pencakupan area 4. Peningkatan Kualitas Informasi Publik 5. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE; 2. Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang 3. Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang 4. Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyediaan layanan jaringan public 5. Pembangunan dan Pengelolaan Kanal

		pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu data statistik sectoral	Informasi Pusat, Daerah dan Mitra 6. Peningkatan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Data Statistik Sektoral
--	--	--	--

2.3. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.340.716.300	4.282.805.878	90	20 %	39	193
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	4.340.716.300	4.282.805.878	90	1.140	4.402	386
Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	13.000.000	13.000.000	100	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	893.439.000	887.261.800	99	2 Kali;2 Kali; 1 Paket	2 Kali;2 Kali; 1 Paket	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Media	946.472.300	894.889.078	94	12 Bulan; 2 Unit	12 Bulan; 2	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Komunikasi Publik					Unit	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	18.900.000	18.900.000	100	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	65.984.000	65.834.000	99	2 Kali	2 Kali	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.402.921.000	2.402.921.000	100	12 Bulan	12 Bulan	100
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.435.208.240	4.394.127.279	99	31 %	43 %	139
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	2.165.513.000	2.159.457.500	100	17 PD	0	0
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.734.000	13.734.000	99	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	2.151.779.000	2.145.723.500	99	12 Bulan; 3 Paket; 2 Aplikasi	12 Bulan; 3 Paket; 2 Aplikasi	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	2.269.695.240	2.234.669.779	98	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	26.368.000	26.368.000	100	3 Kali; 1 Kali	3 Kali; 1 Kali	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.023.634.540	1.003.432.127	98	11 Bulan; 8 Buah; 2 Buah	11 Bulan; 2 Buah; 2 Buah	71
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	7.926.000	7.926.000	100	0 Paket; 2 Kali	0 Paket; 2 Kali	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	20.589.200	20.589.200	100	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	674.491.500	665.999.702	98	1 Set; 4 Paket; 3 Paket; 3 Paket	1 Set; 4 Paket; 3 Paket; 3 Paket	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	29.907.000	28.117.000	94	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	249.525.000	248.949.750	99	1 Paket; 0 Kali; 0 Orang	1 Paket; 0 Kali; 0 Orang	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	213.729.000	209.813.000	98	1 Orang; 1 Orang; 2 Orang; 2 Orang; 1 Orang; 1 Orang; 1 Orang	1 Orang; 1 Orang; 2 Orang; 2 Orang; 1 Orang; 1 Orang; 1 Orang	100
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	23.525.000	23.475.000	99	12 Bulan	12 Bulan	100
URUSAN STATISTIK						
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	253.642.800	252.227.800	99	32 %	32	100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten	253.642.800	252.227.800	99	200 Buku	50 Buku	25
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	59.491.000	59.441.000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu	48.620.000	48.620.000	100	5 Paket	5 Paket	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Statistik Daerah yang Terintegras						
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	113.043.000	111.678.000	98	1 Paket	1 Paket	100
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	32.488.800	32.488.800	100	1 Paket	1 Paket	100
URUSAN PERSANDIAN						
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	299.332.000	288.032.000	96	31 %	51	164
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	201.170.750	191.604.750	95	255 SE	1246	554
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.117.250	51.829.250	97	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	105.877.000	97.779.000	92	5 Paket	5 Paket	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	42.176.500	41.996.500	99	12 Bulan	12 Bulan	100
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	98.161.250	98.161.250	98	1 JKS	0 JKS	0
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	98.161.250	98.161.250	98	12 Bulan	12 Bulan	100

Anggaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2022 bersumber dari APBD. Pendanaan penunjang langsung urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 8.775.924.540,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.676.933.157,00 atau sebesar 98 %. Pada urusan Persandian pendanaan sebesar Rp 299.332.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 288.032.000,00 atau sebesar 96 %. Kemudian pada urusan Statistik memiliki pendanaan sebesar Rp 253.642.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 252.227.800,00 atau sebesar 99 %.

Tabel 2.5
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	10.031.126.202	9.950.273.447	99			99,19
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.774.700	22.072.700	97	100 %	100 %	100
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.643.050	4.465.050	96	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dna Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.131.650	17.607.650	97	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.620.672.053	5.619.221.847	100	100 %	100 %	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.601.343.053	5.599.892.847	99	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.916.000	4.916.000	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.800.500	13.800.500	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Sub Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	612.500	-	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	12.462.000	12.434.500	100	100 %	100 %	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
Daerah						
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12.462.000	12.434.500	99	12 Bulan	12 Bulan	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.463.975	15.463.600	100	100 %	100 %	100
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12.150.875	12.150.500	100	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.340.000	2.340.000	100	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	973.100	973.100	100	4 Laporan	4 Laporan	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	833.716.374	823.165.506	99	100 %	100 %	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.355.300	227.835.360	99	5 Jenis	5 Jenis	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	333.227.839	329.565.989	98	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.840.600	125.173.038	99	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.210.000	133.514.369	95	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.082.635	7.076.750	99	12 Bulan	12 Bulan	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.770.491.100	2.756.239.934	99	100 %	100 %	100
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air	426.940.000	415.920.127	97	12 Bulan	12 Bulan	100

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kinerja/Output		%
				Target	Realisasi	
dan Listrik						
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.343.551.100	2.340.319.807	99	12 Bulan	12 Bulan	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.546.000	701.675.360	93	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	517.396.000	476.759.070	92	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.150.000	195.279.311	93	12 Bulan	12 Bulan	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.636.979	98	12 Bulan	12 bulan	100

Anggaran pencapaian penunjang urusan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2022 bersumber dari APBD. Pendanaan penunjang pendukung urusan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik sebesar Rp 10.031.126.202,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.950.273.447,00 atau sebesar 99 %.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Adapun sebagai dasar komitmen dari melaksanakan Program dan kegiatan tersebut dibuatkan perjanjian kinerja kepada masing masing pemegang kegiatan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, dan mempunyai

tugas dan kewenangan masing masing secara berjenjang, dengan menitik beratkan pada sasaran strategis, indikator kinerja dan komitmen target yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	%	40	Triwulan I	10
					Triwulan II	10
					Triwulan III	10
					Triwulan IV	10
2.	Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	%	46	Triwulan I	10
					Triwulan II	10
					Triwulan III	10
					Triwulan IV	16
3.	Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	%	32	Triwulan I	8
					Triwulan II	8
					Triwulan III	8
					Triwulan IV	8

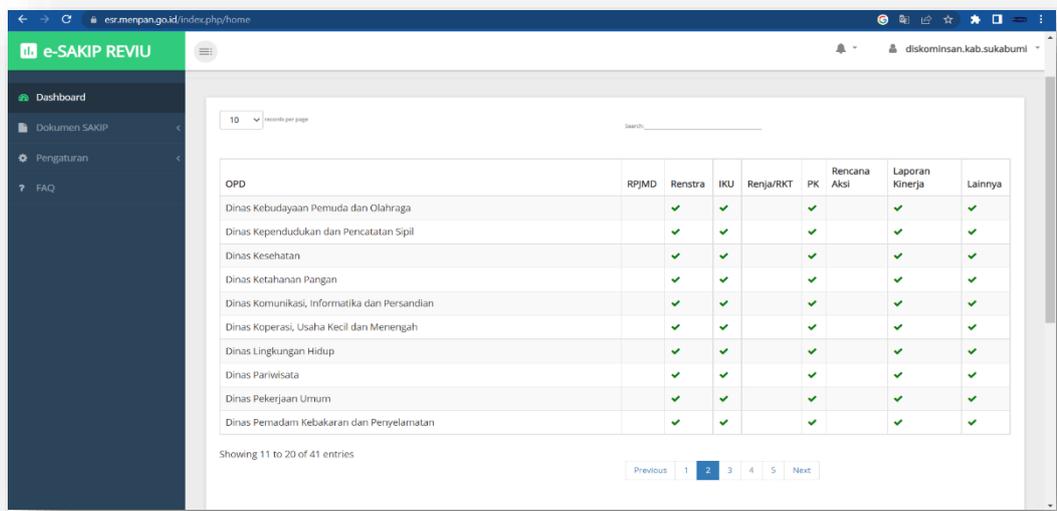
Keterangan :

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, akan tetapi volume anggaran mengalami pertambahan sebesar 5.58 %.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
Pada tahun 2022

2.3. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

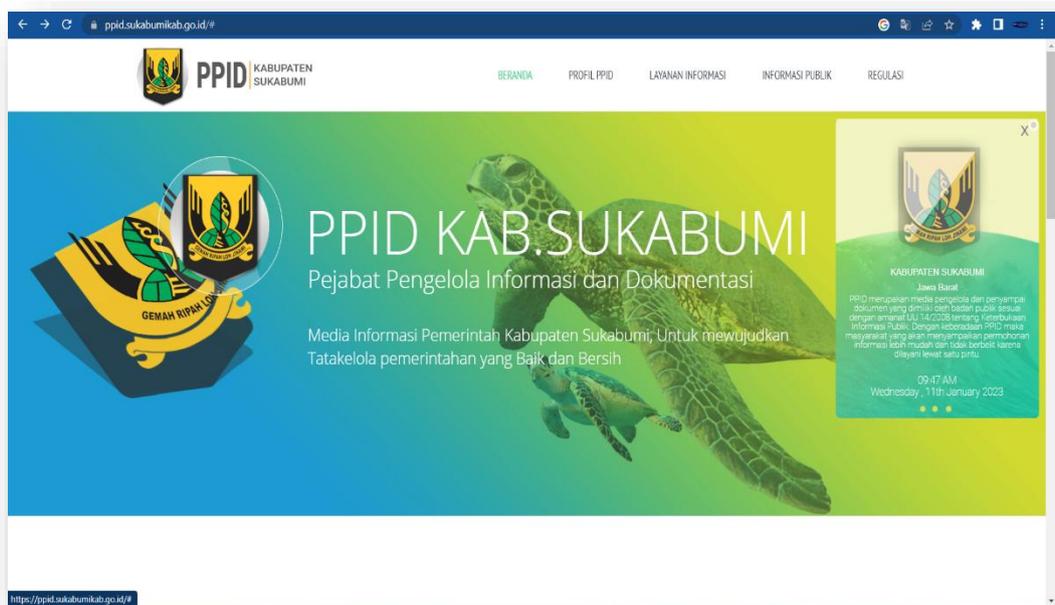
1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah aplikasi yang telah disediakan oleh kemenpan RB <https://esr.mempan.go.id>.

Gambar 2.2
Sistem Aplikasi E-SAKIP Reviu

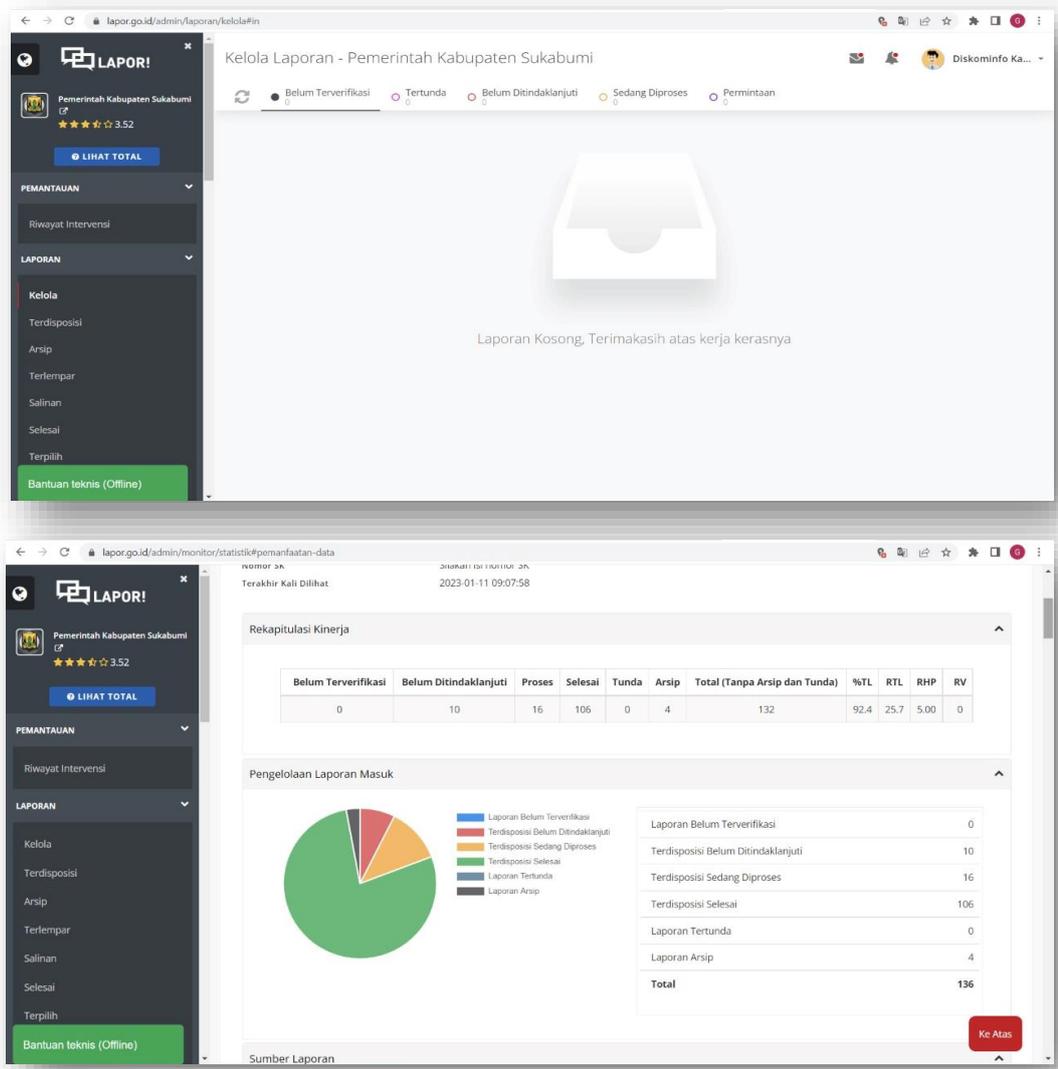


- Instrumen pendukung penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh bagian PPID Dinas Komunikasi Informatika & Persandian Kabupaten Sukabumi melalui Website PPID <https://ppid.sukabumikab.go.id/> dan aplikasi E-lapor

Gambar 2.3
Website PPID Pemda Kabupaten Sukabumi



Gambar 2.4
Aplikasi E-Lapor Kabupaten Sukabumi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI TAHUN 2022

BAB III Berisi :

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2022
2. Inovasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjelaskan capaian kinerja organisasi daerah, yang berisi penyajian capaian kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Kominfo yang disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 sebelumnya, adapun pengukuran dilakukan pada dasarnya pada tahun 2022 dengan membandingkan antara realisasi dengan target dengan melihat dari target akhir renstra pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010. Adapun pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

TABEL 3.2
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Base Line 2021	Tahun 2022			Kriteria/ Kode
						Target	Realisasi	Capaian	
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN									
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.									
T3: Meningkatkan pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan infrastruktur		Poin	3.00		2.60			
	SS13. Meningkatkan luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	100	70.20	76.17	76.17	100	Sangat Baik

Adapun analisis kinerja dari indikator kinerja sasaran meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah adalah terdapat peningkatan dari *base line* kinerja awal tahun 2021 sebesar 70.20 % atau sebanyak 271 titik/desa dari total 386 titik/desa yang tertangani *blankspot*, kemudian pada tahun anggaran 2022 di targetkan meningkat sebanyak 23 titik/desa yang tertangani *blankspot* dengan realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga akumulasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 294 titik/desa atau sebesar 76.16% dengan kriteria penilaian “Sangat Baik”.

TABEL 3.3
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROYEK PRIORITAS TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Proyek Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Capaian 2022 (%)		Kriteria
						K	Rp.	
<i>Zero Blank Spot Internet Area</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<i>Bandwich Jaringan</i>	Titik (Desa)	100	99.86	Sangat Baik
Digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan masyarakat dalam bentuk android melalui aplikasi DESA KaMi.	Aplikasi	100	99.75	Sangat Baik
Integrasi sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berupa aplikasi layanan dengan nama layanan KaMi Ada	Aplikasi	100	99.85	Sangat Baik

Analisis ketercapaian capaian kinerja berdasarkan target proyek prioritas tahun anggaran 2022 pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Proyek Prioritas penanganan *Zero Blank Spot Internet Area* pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebanyak 23 titik/desa area *blankspot*, dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
2. Proyek Prioritas Digitalisasi Pelayanan Publik (Desa dan Kabupaten) pada tahun anggaran 2022 ditargetkan terealisasi melalui pembangunan Open SID desa, namun pada perjalanannya mengalami hambatan dikarenakan perlu adanya pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Gerakan menuju *smart city* sesuai dengan instruksi dari kemenkominfo, kemudian pada anggaran perubahan indikator kinerja digitalisasi pelayanan publik (Desa dan Kabupaten) dapat terealisasi melalui pembangunan sistem aplikasi Desa KaMi (Desa kabupaten Sukabumi) sebanyak satu buah dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.

3. Proyek Prioritas Integrasi Sistem Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Berbasis Digital pada tahun anggaran 2022 ditargetkan terealisasi melalui pengembangan aplikasi BIMA SAKTI yang pada perjalanannya mengalami pemutakhiran menjadi aplikasi KaMi Ada (Kabupaten Sukabumi Ada) dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.

Tabel 3.4
Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon II)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	%	40	49	122	Sangat Baik
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	2 Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	%	46	64	138	Sangat Baik
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	3 Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	%	32	32	100	Sangat Baik

Tabel 3.5
Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas (Esselon III)
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022 (%)		Kriteria
			Kinerja	Rp	Kinerja	RP	Kinerja	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	20	4,340,716,300	39	4,282,805,878	193%	98.67	Sangat Baik
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	31	4,340,716,300	43	4,394,127,279	139%	99.07	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	32	253,642,800	32	252,227,800	100%	99.44	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	31	299,332,000	50.73	288,032,000	164%	96.22	Sangat Baik
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	22,774,700	100	22,072,700	100	97	Sangat Baik
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	5,620,672,053	100	5,619,221,847	100	100	Sangat Baik
	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	755,546,000	100	701,675,360	100	93	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	833,716,374	100	823,165,506	100	99	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa	%	100	2,770,491,100	100	2,756,239,934	100	99	Sangat Baik
			%	100		100		100	99

langganan kebutuhan perkantoran									
Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	0	0	0	0	0	0	Sangat Baik
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	15,463,975	100	15,463,600	100	100	100	Sangat Baik
Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	12,462,000	100	12,434,500	100	100	99.78	Sangat Baik

Analisis ketercapaian capaian kinerja berdasarkan target indikator kinerja program (esselon III) tahun anggaran 2022 pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Informasi Publik Tentang Kebijakan program Prioritas Pemerintah Disampaikan Secara Cepat dan Tepat pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebanyak 1.140 Informasi, dengan realisasi pencapaian kinerja sebanyak 4.402 Informasi atau sebesar 386 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase akses TIK yang tersedia pada tahun anggaran 2022 ditargetkan dengan Jumlah Akses TIK yang tersedia terdiri dari 8 (0,5%) Website PD; 23 Penanganan Jaringan Blankspot Internet (3%); Sistem Informasi Layanan Desa Tersedia 72 (3%); Jaringan Private Admin Induk 15 vpn (2%);pusat data 1 (12%); wifi publik gratis 11 (1%); jaringan intra pemda 16 (3%). TOTAL : 24,5 %, dengan realisasi pencapaian kinerja sebanyak Jumlah Akses TIK yang tersedia terdiri dari 8 (0,5%) Website PD; 23 Penanganan Jaringan Blankspot Internet (3%); Sistem Informasi Layanan Desa Tersedia 381 (15%); **Jaringan Private Admin Induk 2 vpn (0.2%)**; pusat data 1 (12%); wifi publik gratis 11 (1%); **jaringan intra pemda 16 (0%)**. TOTAL : 30,5 % , dengan akumulasi pencapaian indikator sebesar 124% dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Data Statistik Sektoral Yang Diupdate Secara Berkala pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 32% terdiri dari 24 urusan wajib dan 7 urusan pilihan, dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 32 % atau sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.

4. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Tingkat Keamanan Informasi pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebanyak 255 (3.73%) Sertifikat Elektronik; 23 SE (2.95%) yang telah menerapkan SMKI; 23 SE (2.95%) yang telah dilakukan Pentest; Nilai Index KAMI 90 (5.58%); Jumlah Jaring Komunikasi Sandi 1 JKS (3.33%) Total : 18.54, dengan realisasi pencapaian kinerja sebanyak 1.246 (18.23%) Sertifikat Elektronik; **5 SE (0.64%) yang telah menerapkan SMKI; 23 SE (0.64%) yang telah dilakukan Pentest; Nilai Index KAMI 204 (12.65%); Jumlah Jaring Komunikasi Sandi 0 JKS (0%)** Total : 32.16, dengan akumulasi pencapaian indikator sebesar 173% dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.
5. Pencapaian Indikator Kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 100 %, dengan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100 % atau sebesar 100 % dan mendapatkan predikat kriteria **“Sangat Baik”**.

Gambar 3.1
Pendampingan Pemasangan Jaringan Intra Internet (penanganan *blankspot area*) di Desa Bantargadung



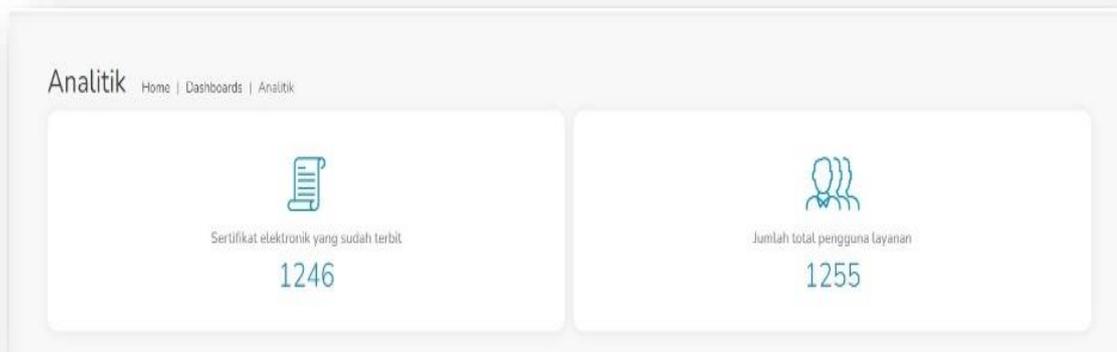
Gambar 3.2
Pendampingan Pemasangan Jaringan Intra Internet (penanganan *blankspot area*) di Cikidang



Gambar 3.3
Laporan Kerjasama Pemberitaan/Penyebaran Informasi Melalui Media Online



Gambar 3.4
Rekapitulasi Sertifikat Elektronik untuk penggunaan tanda tangan elektronik yang telah terbit



Gambar 3.5
Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tanta Tangan Elektronik Lingkup Dinas



Gambar 3.6
Kegiatan Penyusunan metadata Statistik Sektoral oleh Bapak Sekretaris DKIP, Sub Koordinator pada Bappelitbangda dan Kepala BPS Sukabumi



Gambar 3.7
Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral



3.2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Permasalahan pencapaian kinerja yang tidak maksimal pada beberapa indikator pada setiap sasaran strategis dinas disebabkan karena beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. SDM yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat terbatas;
- b. Cakupan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat luas;
- c. Kurang dukungan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik terutama dalam pengembangan jaringan blankspot;
- d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercukupi anggarannya sehingga dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dioptimalkan.

Berbagai permasalahan tersebut di atas tidak mengurangi kinerja dinas dan dapat dicari solusi pemecahannya melalui :

- a. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan;
- b. Meningkatkan peranan Kominfo di wilayah serta peranan bidang Teknis dalam memberikan pelayanan di bidang kominfo di Kabupaten Sukabumi;
- c. Meningkatkan peran swasta, serta peranan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan di bidang perhubungan dan kominfo melalui pelaksanaan kegiatan secara bersama sama atau diikuti sertakan;
- d. Menyampaikan kebutuhan Anggaran tidak terbatas pada APBD Kabupaten Sukabumi saja tetapi dapat bersumber dari pendanaan lain dan sumberdaya yang ada dengan pengoptimalan sebaik mungkin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sesuai anggaran yang di tetapkan serta kesesuaian anggaran kas yang telah di tetapkan sehingga serapan anggarannya akan lebih baik dan pada akhir nya setiap program pembangunan yang di rencanakan berhasil dengan baik.

3.3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.6
Analisis Atas Efisiensi Capaian IKU Dinas
Penggunaan Sumber Daya (Hanya Untuk Capaian Kinerja $\geq 100\%$)

Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Efisiensi %	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022 (%)		Kriteria
			Kinerja	Rp	Kinerja	RP	Kinerja	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia	1.13	40	8.775.924.540	49	8.676.933.157	122%	98.87	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	0.56	32	253,642,800	32	252,227,800	100%	99.44	Sangat Baik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	3.78	31	299,332,000	50.73	288,032,000	164%	96.22	Sangat Baik
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	3	100	22,774,700	100	22,072,700	100	97	Sangat Baik
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0	100	5,620,672,053	100	5,619,221,847	100	100	Sangat Baik
	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	7	100	755,546,000	100	701,675,360	100	93	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	1	100	833,716,374	100	823,165,506	100	99	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	0	100	2,770,491,100	100	2,756,239,934	100	99	Sangat Baik
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat	0	100	0	0	0	0	0	Sangat Baik

waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan									
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	0	100	15,463,975	100	15,463,600	100	100		Sangat Baik
Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0.22	100	12,462,000	100	12,434,500	100	99.78		Sangat Baik

Berdasarkan data tabel diatas capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan tetap memiliki sisa anggaran yang menjadi nilai efisiensi anggaran pada tahun 2022.

3.4. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.7
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Satuan	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketersediaan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	43	139
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39	193	
Meningkatnya Nilai Area Keamanan Informasi	Prosentase Nilai Area Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	50.73	164
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Meningkatnya mutu data statistik sektoral dalam proses perencanaan dan evaluasi	Persentase Penggunaan Data Statistik untuk pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	32	100

pembangunan daerah					
--------------------	--	--	--	--	--

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keberhasilan Pencapaian ketiga Sasaran Strategis pada tabel diatas didukung melalui 4 program dan 6 kegiatan, yaitu :

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik capaian sebesar 193% didukung dengan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang menunjang pencapaian program.
- b. Program Aplikasi Informatika capaian sebesar 139 % didukung dengan 2 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang menunjang pencapaian program.
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial capaian sebesar 100% didukung dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang menunjang pencapaian program.
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi capaian sebesar 164% didukung dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang menunjang pencapaian program.

3.5. INOVASI

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur sipil negara untuk bergerak dinamis, kreatif dan berperan aktif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja pada tahun anggaran 2022 antara lain:

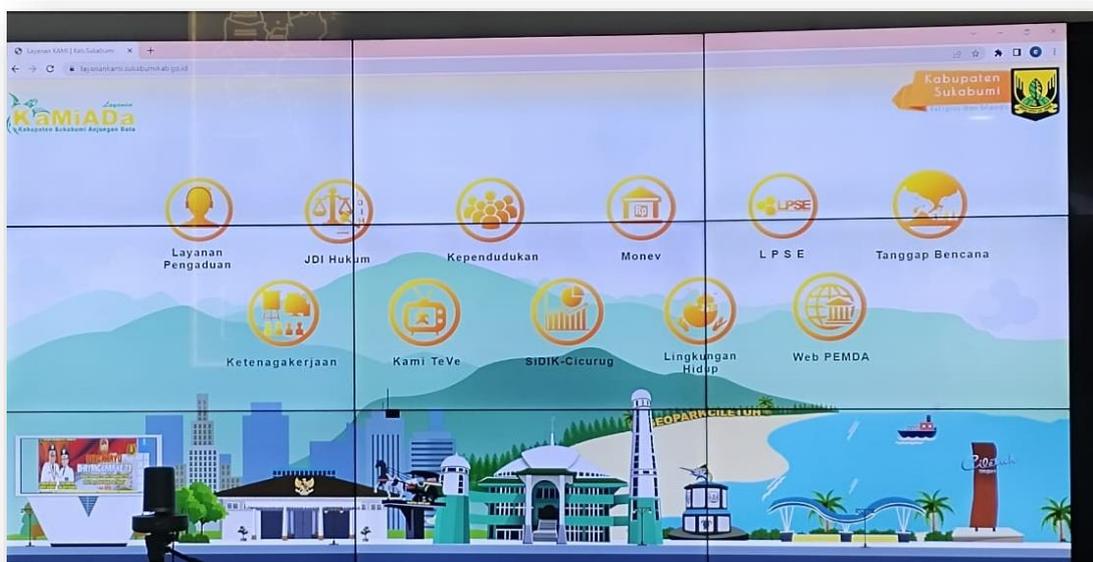
1. Pada era digitalisasi 4.0 dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah mulai di implementasikan pada kebutuhan administrasi pada internal pemeritah daerah. Salah satunya adalah dengan melalui penandatanganan dokumen secara digital atau Tanda Tangan Elektronik (TTE). Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi memanfaatkan TTE melalui Sistem aplikasi PANTER untuk menandatangani dokumen, tentunya hal ini lebih mudah, murah dan menghemat waktu.

Gambar 3.8
Aplikasi Panter untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)

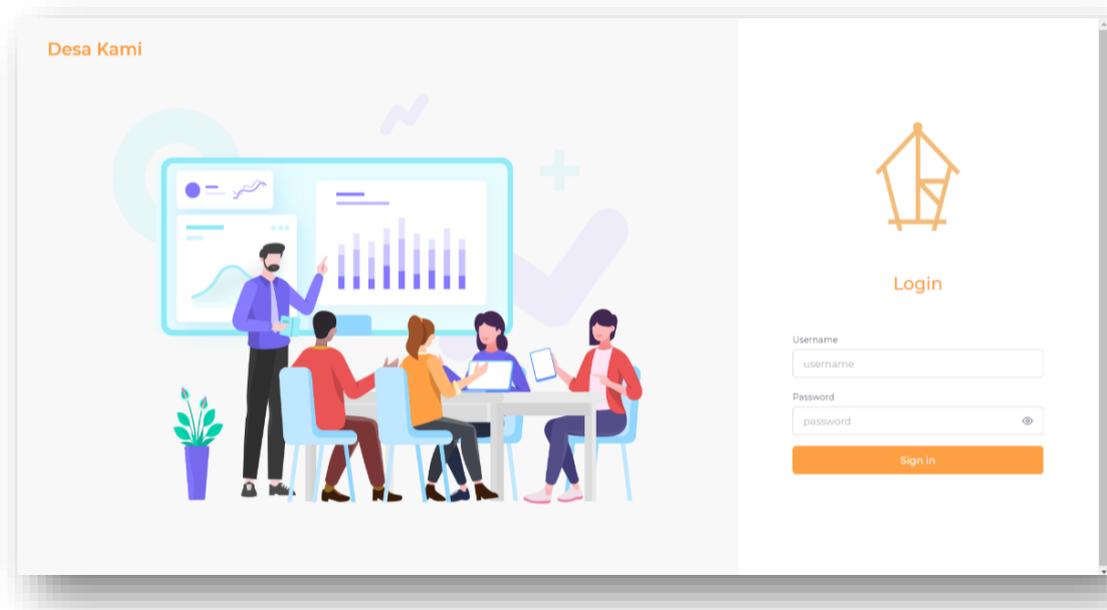


2. Dalam rangka pelayanan administrasi dan layanan publik yang optimal, maka dibutuhkan alat bantu berupa sistem aplikasi yang terintegrasi satu dengan lainnya yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan proses bisnis pemerintah daerah. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi telah membuat dua aplikasi yang dapat menjadi solusi agar terwujudnya pelayanan yang mudah, murah dan cepat, yaitu dengan aplikasi DesaKaMi dan Aplikasi KaMiAda

Gambar 3.9
Aplikasi KaMiAda



Gambar 3.10
Aplikasi DesaKaMi



3. Website PPID dan portal Kabupaten Sukabumi sebagai wadah dalam keterbukaan informasi publik Pemda tahun anggaran 2022

Gambar 3.11
Website PPID dan Portal Pemerintah Kabupaten Sukabumi





3.4. KINERJA LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi menginventarisasi Kinerja Lintas Sektor sebagai berikut :

TABEL 3.8
Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	OPD	Diskominfo sebagai koordinator dalam Penilaian SPBE	Indeks SPBE	84 Perangkat Daerah	Bagi OPD : 1. Mendukung pencapaian kinerja tujuan RPJMD Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif , Profesional dan Akuntabel. 2. Mendukung pencapaian kinerja program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 3. Mendukung pencapaian kinerja keamanan informasi. 4. Mendukung pencapaian target kinerja data statistik sektoral.
		Instansi Lainnya	Perangkat Daerah pendukung lainnya sebagai peyedia data dukung dan implementasi sesuai dengan urusan masing masing			
		Kementerian PAN RB	Konsultasi dalam penilaian SPBE			
		Dunia Usaha/ Masyarakat	-			Bagi Kelompok Sasaran : 1. Menciptakan Pelayanan Pemerintah yang Mudah, Murah, Cepat serta Transparan.

2	Pembinaan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemda	OPD	Diskominfo sebagai PPID utama pemda Kabupaten Sukabumi memberikan pendampingan PPID pembantu (OPD di pemda Kab. Sukabumi) tentang pentingnya keterbukaan informasi publik	Meningkatnya jumlah Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	84 Perangkat Daerah	<p>Bagi OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Masyarakat/ Dunia Usaha	-			<p>Bagi Kelompok sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesadaran PPID Pembantu akan pentingnya keterbukaan informasi public dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
3	Pengelolaan Keluhan Masyarakat atas Layanan Pemda Kabupaten Sukabumi	Koordinator Pengelolaan Pengaduan	Inventarisasi permasalahan, pendisposisian aduan, pendampingan teknis dan pengelolaan aplikasi E-lapor Pemkab Sukabumi	Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	Pejabat Penghubung di 84 Perangkat Daerah	<p>Bagi PD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kinerja pencapaian RPJMD 2. Mendukung pencapaian kinerja program informasi dan komunikasi publik
		Kementrian PANRB	Konsultasi, Komunikasi dan Memberikan Bimtek Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N Lapor			<p>Bagi Kelompok Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas pejabat penghubung di Perangkat Daerah Pemda Kabupaten Sukabumi
		Dunia usaha/ Masyarakat	-			

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

BAB IV Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
Peningkatan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ini merupakan media informasi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik sesuai dengan potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas Komunikasi ,informatika dan Persandian. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi antara lain sebagai berikut :
 - a. Masih terdapat lokasi blankspot internet, sehingga pemanfaatan aplikasi menjadi sulit diakses oleh masyarakat wilayah blankspot internet;
 - b. Kesulitan mendapatkan data yang sesuai dengan prinsip satu data;
 - c. Belum terbentuknya Komitmen dan kepercayaan antar Perangkat Daerah terhadap Implementasi Satu Data Indonesia;
 - d. SDM yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat terbatas;
 - e. Cakupan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sangat luas;

- f. Kurang dukungan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik terutama dalam pengembangan jaringan blankspot;
- g. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercukupi anggarannya sehingga dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dioptimalkan.

Berbagai permasalahan tersebut di atas tidak mengurangi kinerja dinas dan dapat dicari solusi pemecahannya melalui :

- a. DKIP memiliki portal website, Aplikasi Digital terintegrasi BIMA SAKTI yang telah dilakukan perbaharuan menjadi aplikasi KaMi Ada dan aplikasi Layanan Desa KaMi;
- b. Diskominfo sudah mulai menerapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik secara bertahap dengan sumber daya yang ada
- c. Penyediaan layanan internet gratis pada beberapa tempat publik;
- d. Pemanfaatan aplikasi E-Lapor yang responsive sebagai sarana menjawab keluhan masyarakat;
- e. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan;
- f. Meningkatkan peranan Kominfo di wilayah serta peranan bidang Teknis dalam memberikan pelayanan di bidang kominfo di Kabupaten Sukabumi;
- g. Meningkatkan peran swasta, serta peranan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan di bidang perhubungan dan kominfo melalui pelaksanaan kegiatan secara bersama sama atau diikuti sertakan;
- h. Menyampaikan kebutuhan Anggaran tidak terbatas pada APBD Kabupaten Sukabumi saja tetapi dapat bersumber dari pendanaan lain dan sumberdaya yang ada dengan pengoptimalan sebaik mungkin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. REKOMENDASI

Agar langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka, kami memberikan rekomendasi sebagai masukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Inovasi dalam menyelenggaraan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau aplikasi yang sudah terintegrasi sebagai upaya pelayanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat dan transparan;
2. Menyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagai sarana prasarana pengamanan jaringan;
3. Pemberian sistem *barcode* dalam pelaksanaan Tanda Tangan Secara Elektronik agar dokumen yang sudah dilakukan TTE dapat tetap aman saat disebarluaskan secara *offline*;
4. Menyediakan informasi yang berkualitas dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
5. Meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam menyediakan, mengumumkan, mengelola dan melayani permintaan informasi publik;
6. Penguatan komitmen terhadap implementasi Satu Data Indonesia melalui penguatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai wali data.

Demikian laporan kinerja yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 06 Februari 2022

KEPALA DINAS,

EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., MM
Pembina Tk.1 IV/b
NIP.19670903 199601 1 001

LAMPIRAN